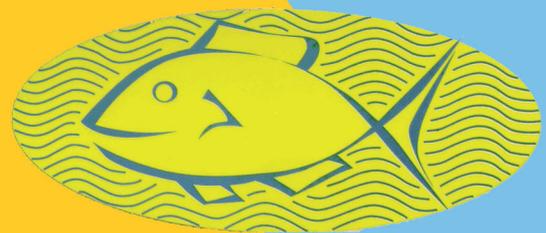


JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA *(Indonesian Fisheries Policy Journal)*



**PUSAT RISET PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 10 Nomor 1 Mei 2018

Nomor Akreditasi Kementerian RISTEKDIKTI: 21/EKPT/2018
Terakreditasi Peringkat 2 berlaku selama 5 (Lima) Tahun
(Periode Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016-Volume 12 Nomor 2 Tahun 2020)

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia adalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum daratan. Jurnal ini menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautan dan perikanan.

Terbit pertama kali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan:
MEI dan NOVEMBER.

Ketua Penyunting:

Prof. Dr. Ali Suman (Sumberdaya dan Lingkungan-Balai Riset Perikanan Laut)

Dewan Penyunting:

Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)

Prof. Dr. Ir. Zahri Nasution, M.Sc. (Sosiologi Perikanan-Pusat Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)

Dr. Ir. Tri Wiji Nurani (Analisis Sistem pada bidang Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan-Institut Pertanian Bogor)

Dr. Ir. Andin Taryoto, M.Si. (Sosiologi Perikanan-Sekolah Tinggi Perikanan)

Dr. Anang Hari Kristanto (Pemuliaan Ikan-Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan)

Editing Bahasa:

Dr. Wijopriono

Penyunting Pelaksana:

Dra. Endang Sriyati
Arief Gunawan, S. Kom.

Administrasi:

Darwanto, S.Sos.
Amalia Setiasari, A.Md.

Alamat Redaksi/Penerbit:

Pusat Riset Perikanan

Gedung Balitbang KP II, Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara-4430

Telp. (021) 64700928, Fax. (021) 64700929

Website: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>

e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia diterbitkan oleh Pusat Riset Perikanan-Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LEMBAR INDEKSASI

FOKUS DAN RUANG LINGKUP JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>) memiliki p-ISSN 1979-6366; e-ISSN 2502-6550 dengan Nomor Akreditasi Kementerian RISTEKDIKTI: 21/EKPT/2018, Terakreditasi Peringkat 2 berlaku selama 5 (Lima) Tahun, (Periode Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016-Volume 12 Nomor 2 Tahun 2020). Terbit pertama kali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November.

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia menyajikan analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian, informasi dan pemikiran dalam kebijakan kelautan dan perikanan.

Naskah yang masuk ke Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia akan dicek mengenai pedoman penulisannya oleh Administrasi, apabila sudah sesuai akan direview oleh 2 (dua) orang Dewan Penyunting dan 1 (satu) orang Bebestari (Peer-Reviewer) berdasarkan penunjukan dari Ketua Dewan Penyunting. Keputusan diterima atau tidaknya suatu naskah menjadi hak dari Ketua Dewan Penyunting berdasarkan atas rekomendasi dari Dewan Penyunting dan Bebestari.

INFORMASI INDEKSASI JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>) memiliki p-ISSN 1979-6366; e-ISSN 2502-6550 yang sudah terindeks di beberapa pengindeks bereputasi, antara lain: Cross Ref, Indonesian Scientific Journal Database (ISJD), SCILIT, Sherpa/Romeo, Google Scholar, Directory Open Access Journals (DOAJ), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), British Library One Search, Lancaster University, Sinta dan Mendeley.



**BEBESTARI PADA
JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
(JKPI)**

1. Prof. Dr. Ir. M.F. Rahardjo (Ikhtologi, Ekologi Ikan, Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan-Institut Pertanian Bogor)
2. Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, M. Si. (Sumber Daya dan Lingkungan-Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan)
3. Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani (Limnologi-Pusat Penelitian Limnologi, LIPI)
4. Prof. Dr. Ir. Ngurah N Wiadnyana, DEA. (Ekologi Perairan-Pusat Riset Perikanan)
5. Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, M.S. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Institut Pertanian Bogor)
6. Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M. Si. (Metode Penangkapan Ikan-Institut Pertanian Bogor)
7. Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Institut Pertanian Bogor)
8. Prof. Dr. Ir. Wudianto, M.Sc. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)
9. Prof. Dr. Ir. Husnah, M. Phil. (Toksikologi dan Lingkungan-Pusat Riset Perikanan)
10. Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc. (Hidro Akustik Perikanan-Institut Pertanian Bogor)
11. Prof. Dr. Haryanti (Genetika dan Bioteknologi-Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan)
12. Prof. Dr. Sri Juwana (Genetika dan Bioteknologi-Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI)
13. Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.S. (Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Pusat Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
14. Prof. Dr. Ir. Janny Dirk Kusen, MSc. (Biologi Kelautan-Universitas Sam Ratulangi)
15. Projo Danoedoro M.Sc., Ph.D. (Remote Sensing and GIS for Land-Universitas Gajah Mada)
16. Prof. Dr. Ir. Rachman Syah, M.S. (Akuakultur-Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau)
17. Prof. Dr. Agus Djoko Utomo, M.Si. (Biologi Perikanan-Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan)
18. Dr. Ir. Augy Syahailatua, M.Sc. (Pusat Penelitian Oseanologi-LIPI)
19. Prof. Dr. Krismono, M.S. (Sumber Daya dan Lingkungan-Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan)
20. Dr. Ir. Purwito Martosubroto (Pengelolaan Perikanan-KAJISKAN)
21. Ir. Badrudin, M.Sc. (Biologi Perikanan Demersal-Balai Riset Perikanan Laut)
22. Dr. I. Gede Sedana Merta, M.Sc. (Biologi Perikanan)
23. Dr. Ir. Duto Nugroho, M.Si. (Teknologi Penangkapan Ikan-Pusat Riset Perikanan)
24. Dr. Estu Nugroho (Sumber Daya Genetik Ikan-Pusat Riset Perikanan)
25. Drs. Bambang Sumiono, M.Si. (Biologi Perikanan-Pusat Riset Perikanan)
26. Dr. Ir. Syahroma Husni Nasution, M.Sc. (Biologi Perikanan-Limnologi LIPI)
27. Dr. Ir. Mohammad Mukhlis Kamal, M. Sc. (Ikhtologi, Rekrutmen Ikan, Fisiologi Respirasi, Ikhtoplankton, Rekrutmen Ikan dan Biologi Konservasi Perairan-Institut Pertanian Bogor)
28. Dr. -Ing. Widodo Setiyo Pranowo, M.Si. (Oseanografi-Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir)

29. Dr. Nimmi Zulbainarni (Ekonomi Sumber Daya Perairan-Institut Pertanian Bogor)
30. Dra. Sri Turni Hartati, M.Si. (Lingkungan Sumberdaya Perairan-Pusat Riset Perikanan)
31. Dr. Hawis H. Maduppa, S.Pi., M.Si. (Biologi Laut-Institut Pertanian Bogor)
32. Dr. Lilis Sadiyah, S. Si (Sumber Daya dan Lingkungan-Pusat Riset Perikanan)
33. Dr. Andi Parenrengi (Perbenihan, Genetika, Bioteknologi-Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros)

UCAPAN TERIMA KASIH

Ketua Penyunting Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) mengucapkan terima kasih kepada para Bebestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal kebijakan ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Bebestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 10 Nomor 1 Mei 2018 adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, M. Si. (Sumber Daya dan Lingkungan-Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan)
2. Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.S. (Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-Pusat Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
3. Dr. Andi Parenrengi (Perbenihan, Genetika, Bioteknologi-Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros)
4. Dr. Lilis Sadiyah, S. Si (Sumber Daya dan Lingkungan-Pusat Riset Perikanan)
5. Drs. Bambang Sumiono, M.Si. (Biologi Perikanan-Pusat Riset Perikanan)

Keterlibatan Bebestari pada terbitan Volume 10 Nomor 1 Tahun 2018 secara rinci adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.S. Telah mengevaluasi karya tulis ilmiah dengan judul:

1. Urgensi Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
2. Dinamika Kelembagaan dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perikanan Kepiting Bakau di *Ohoi* Evu Kabupaten Maluku Tenggara

KATA PENGANTAR

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) di tahun 2018 memasuki Volume ke-10. Proses penerbitan jurnal ini dibiayai oleh Pusat Riset Perikanan tahun anggaran 2018. Semua naskah yang terbit telah melalui proses evaluasi oleh Dewan Penyunting dan Bebestari serta editing oleh Penyunting Pelaksana.

Pada terbitan nomor satu di Tahun 2018, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia menampilkan enam artikel hasil penelitian perikanan perairan umum daratan dan perairan laut. Enam artikel mengulas tentang: Pengendalian penyakit *ice-ice* budidaya rumput laut, *Kappaphycus alvarezii*: Korelasi Musim dan Manipulasi Terbatas Lingkungan; Kontribusi Rantai Nilai Terhadap Peningkatan Daya Saing Perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap dan Sekitarnya; Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016; Kesiapan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Mendukung Pengelolaan Program *Restocking* Lobster; Kontruksi Sosial dalam Membanguan Bisnis Lobster di Indonesia; Dinamika Kelembagaan dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perikanan Kepiting Bakau di *Ohoi* Evu Kabupaten Maluku Tenggara.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dan pengelola sumberdaya perikanan di Indonesia. Ketua Penyunting mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif para peneliti dari lingkup dan luar Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN).

Ketua Penyunting

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Volume 10 Nomor 1 Mei 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR BEBESTARI.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
KUMPULAN ABSTRAK	vi-vii
Pengendalian penyakit <i>ice-ice</i> budidaya rumput laut, <i>Kappaphycus alvarezii</i> : Korelasi Musim dan Manipulasi Terbatas Lingkungan <i>Oleh: Robert Pensa Maryunus.....</i>	1-10
Kontribusi Rantai Nilai Terhadap Peningkatan Daya Saing Perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap dan Sekitarnya <i>Oleh: Bambang Nariyono, Arief Daryanto, M. Firdaus dan Setjadi Johar.....</i>	11-23
Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 <i>Oleh: Budi Suhariyanto.....</i>	25-32
Kesiapan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Mendukung Pengelolaan Program <i>Restocking</i> Lobster <i>Oleh: Zahri Nasution, Bayu Vita Indah Yanti dan Nurlaili.....</i>	33-42
Kontruksi Sosial dalam Membangun Bisnis Lobster di Indonesia <i>Oleh: Armen Zulham</i>	43-52
Dinamika Kelembagaan dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perikanan Kepiting Bakau di <i>Ohoi</i> Evu Kabupaten Maluku Tenggara <i>Oleh: James Abrahamsz, Marvin M. Makailipessy dan Imanuel M. Thenu.....</i>	53-61
PEDOMAN PENULISAN.....	App. 62
SERTIFIKAT AKREDITASI.....	App. 63

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA
Volume 10 No.1 Mei 2018

KUMPULAN ABSTRAK

PENGENDALIAN PENYAKIT *ICE-ICE* BUDIDAYA RUMPUT LAUT, *Kappaphycus alvarezii*: KORELASI MUSIM DAN MANIPULASI TERBATAS LINGKUNGAN

Robert Pensa Maryunus

JKPI Mei 2018, Vol. 10 No 1, Hal: 1-10

e-mail: roby_pm@yahoo.co.id

ABSTRAK

Serangan penyakit *ice-ice* di periode musim tertentu pada budidaya rumput laut *Kappaphycus alvarezii* menjadi masalah serius, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor pemicu awal (*primary impact*) adalah terjadinya kekurangan nutrisi (*nutrients shortage*) pada perairan laut. Pada pihak lain, ketersediaan nutrisi di perairan laut pada wilayah-wilayah tertentu sangat dipengaruhi oleh fenomena *upwelling*. Fenomena *upwelling* terjadi karena adanya arus lintas Indonesia yang juga turut berpengaruh terhadap musim. Makalah ini membahas keterkaitan antara serangan penyakit *ice-ice*, arus lintas Indonesia, fenomena *upwelling*, *downwelling* dan musim dalam kaitannya dengan upaya untuk mencegah dan mengelola serangan *ice-ice* melalui perendaman pupuk yang mengandung sumber unsur N (nitrogen), P (fosfor) dan K (kalium) dikombinasikan dengan pembersihan rutin dan pengaturan posisi tanam terhadap permukaan air. Tindakan manipulasi terbatas lingkungan budidaya rumput laut pada periode musim ekstrim terbukti efektif mengendalikan penyakit *ice-ice* sekaligus diyakini mampu mempertahankan kontinuitas produksi.

Kata Kunci: *Ice-ice*; kekurangan nutrisi; musim; rumput laut; *upwelling*

KONTRIBUSI RANTAI NILAI TERHADAP PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN TUNA DI KABUPATEN CILACAP DAN SEKITARNYA

Bambang Nariyono

JKPI Mei 2018, Vol. 10 No 1, Hal: 11-23

e-mail: b.nariyono@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia dalam industri tuna sangat diperhitungkan karena posisinya sebagai pemasok lebih dari 15 % produksi tuna dunia, tetapi di sisi lain daya saing industri perikanan tuna masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis

kontribusi rantai nilai perikanan tuna terhadap daya saing industri perikanan tuna di Kabupaten Cilacap. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2017. Hasil analisis *Second Order Structural Equation Modeling* didapatkan bahwa rantai nilai berpengaruh terhadap daya saing industri tuna dengan *loading factor* 0.540 dan nilai *p* yang signifikan. Pengujian terhadap model secara simultan terbukti bahwa model telah fit dengan telah dipenuhinya semua ukuran fitting model yang diindikasikan dengan nilai *Chi-Square* kecil yaitu 301.252, RMSEA = 0.072, GFI = 0.907, CFI = 0.923, dan CMIN/DF = 1.814. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa rantai nilai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya saing industri tuna. Dengan demikian strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing industri tuna dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rantai nilai perikanan tuna terutama dari aspek operasional, *outbond logistic*, dan *services*.

Kata Kunci: Industri tuna; Rantai nilai; Structural Equation Modeling (SEM)

URGENSI PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN MENGGUNAKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016

Budi Suhariyanto

JKPI Mei 2018, Vol. 10 No 1, Hal: 25-32

e-mail: penelutihukumma@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Perikanan Indonesia memiliki kelemahan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menimbulkan multitafsir dan menyulitkan penegak hukum dalam memidana korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Kajian dilakukan untuk mendalami urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk keperluan tersebut, dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dapat diberlakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi dalam UU Perikanan.

Kata Kunci: Korporasi; Pelaku; Tindak Pidana Perikanan

KESIAPAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM Mendukung PENGELOLAAN PROGRAM RESTOCKINGLOBSTER

Zahri Nasution

JKPI Mei 2018, Vol. 10 No 1, Hal: 33-42

e-mail: zahri_nas@yahoo.com

ABSTRAK

Pemulihan populasi lobster dilihat dari aspek sosial ekonomi adalah penyiapan rekayasa sosial dalam mendukung upaya penguatan kelembagaan *restocking lobster* berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan program *restocking lobster* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur), Jawa Barat (Kab. Pangandaran) dan Banten (Kab. Pandeglang). Data aspek kelembagaan yang dikumpulkan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan kaitannya dengan pengembangan *restocking lobster*. Informan terdiri dari masyarakat nelayan, petugas pemerintah daerah di berbagai kantor dinas terkait, petugas di kantor Desa, dan informan yang dianggap mengetahui keberadaan data dan informasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang dipandu dengan topik data. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lokasi yang paling memiliki kesiapan dalam mendukung program *restocking lobster* adalah Kabupaten Pangandaran., maka Opsi kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program *restocking lobster* berbasis masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada pengurus organisasi yang terbentuk dalam program *restocking lobster* dan manfaatnya bagi masyarakat, sumber daya dan populasi lobster dan pemerintah. Termasuk didalamnya regulasi penangkapan dan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran petugas pengawasan di lapangan. Penegakan aturan yang terkait dengan penetapan otoritas pengelolaan sumberdaya lobster terkait program *restocking lobster* perlu dilakukan.

Kata Kunci: Kelembagaan; *restocking*; lobster; berbasis masyarakat

KONTRUKSI SOSIAL DALAM MEMBANGUN BISNIS LOBSTER DI INDONESIA

Armen Zulham

JKPI Mei 2018, Vol. 10 No 1, Hal: 43-52

e-mail: zahri_nas@yahoo.com

ABSTRAK

Konstruksi sosial bisnis lobster merupakan fenomena sosial yang berperan menjaga keberlanjutan

bisnis lobster. Peran itu telah ditunjukkan melalui berbagai regulasi dan kelembagaan (asosiasi lobster) di Amerika Utara, Australia dan Uni Eropa. Di Indonesia asosiasi atau organisasi yang demikian belum ada. Keberadaan Permen KP No. 56/ 2016, merupakan konstruksi sosial yang penting untuk merintis pengembangan bisnis lobster Indonesia yang berkelanjutan. Tulisan ini mempelajari fenomena konstruksi sosial dari jaringan sosial bisnis lobster pada berbagai kawasan di Indonesia. Bahan tulisan ini, diperoleh dari studi pustaka, hasil survey di Simeulue tahun 2015 – 2016 dan wawancara narasumber yang terkait langsung dengan bisnis lobster pada bulan Juli 2017. Hasil analisis menunjukkan kebijakan terobosan harus dilakukan dalam mengembangkan bisnis lobster di Indonesia dengan membentuk kelembagaan Asosiasi Lobster Indonesia (ALI) atau Konsorsium Lobster Indonesia (KLI). ALI atau KLI berperan tidak hanya untuk berdagang, tetapi membantu pemerintah menjaga stok lobster dan mempromosikan teknik penangkapan/budidaya lobster, serta merancang kebijakan untuk mempengaruhi pasar global.

Kata Kunci: Lobster; konstruksi sosial; perdagangan; pasar global

DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KEPITING BAKAU DI OHOI EVU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

James Abrahamsz

JKPI Mei 2018, Vol. 10 No 1, Hal: 53-61

e-mail: zahri_nas@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan perikanan kepiting di Kawasan Konservasi Pulau Kei Kecil dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku telah dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan kelembagaan pengelola di Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay. Inisiatif pengembangan model pengelolaan perikanan kepiting berbasis masyarakat dimulai dengan pembentukan kelompok nelayan Sinar Abadi. Kajian bertujuan menilai dinamika, status dan perkembangan kelembagaan di masyarakat dalam mendukung pengelolaan perikanan kepiting secara berkelanjutan. Dinamika kelembagaan dianalisis melalui penilaian domain kelembagaan dalam Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan pendekatan flag model. Status dan perkembangan kelembagaan dianalisis dengan pendekatan Institutional Development Framework (IDF). Penelitian ini menemukan dinamika kelembagaan pengelola perikanan kepiting bakau di Ohoi Evu tergolong dalam kategori sedang. Status kelembagaan cukup baik, berada pada tahap pemantapan dan kebutuhan pengembangan kelembagaan mendesak. Implikasi pengembangannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dalam

pengelolaan perikanan kepiting bertanggungjawab, penetapan dan implementasi Rencana Pengelolaan

Perikanan Kepiting, serta penguatan sumberdaya manajemen kelompok dan kemitraan.

Kata Kunci: **Kepiting bakau; pengelolaan perikanan; status kelembagaan; dinamika kelembagaan**